

PENGARUH PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)

Pradesta Ariningtika,
Endang Kiswara¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the practice of good corporate governance on corporate environmental disclosure. The practice of good corporate governance is proxied by the proportion of the board of commissioners, the number of meetings the board, audit committee size and the number of audit committee meetings. This study also includes profitability, company size and leverage as control variables. The population of this research is the mining industry companies are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2011. Total observations is 38 mining companies. Sampling technique in this study is purposive sampling method. The data analysis techniques use multiple linear regression method. The results showed that the number of meetings of the board of commissioners and the size of the audit committee significantly influence corporate environmental disclosure. Meanwhile, the proportion of independent commissioners, the number of audit committee meetings, profitability, company size and leverage did not significantly influence towards corporate environmental disclosure

Keywords: *Good Corporate Governance Practices, Corporate Environmental Disclosure, profitability, leverage.*

PENDAHULUAN

Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, namun juga dari tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun lingkungan. Pentingnya aktivitas dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan tentang pengungkapan Corporate Social Responsibility (pertanggungjawaban sosial perusahaan) bagi Perseroan terbatas. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dan dalam pasal 74 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Di Indonesia masalah pencemaran lingkungan masih banyak terjadi seperti kasus PT Nusa Halmahera Minerals Ltd Perusahaan tambang yang melakukan aktivitas produksi emas ini berlokasi di Pulau Halmahera. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan lubang bekas pertambangan seperti di lubang tambang Gosowong, dibiarkan begitu saja, serta longsoran yang dapat menimbulkan air asam tambang dan berpotensi mencemari badan sungai Tobobo. Limbah PT NHM juga mencemari teluk KAO. (Global Future Institute, 2009).

¹ Penulis penanggung jawab

Pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan, menimbulkan tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar perusahaan memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungannya didalam laporan tahunan perusahaan (Anggraini, 2006). Sun, dkk., (2010) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela dalam annual report seperti pengungkapan lingkungan perusahaan atau yang sering disebut dengan *corporate environmental disclosure* dipandang perlu untuk menunjukkan kepada *stakeholders* akan kesadaran perusahaan dari kepentingan yang lebih luas dan akuntabilitas dengan cara berperilaku tanggung jawab sosial. Semakin banyaknya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, maka *image* perusahaan menurut pandangan masyarakat menjadi meningkat atau citra perusahaan menjadi baik.

Tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut dengan *Good corporate governance* berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun pengungkapan lingkungan perusahaan (Chtourou, dkk., 2001). Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) karena merupakan bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Effendi, 2009). Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi serta meminimalkan terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi. Selain itu penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Atas dasar uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?

TELAAH PUSTAKA

Agensi Teori (Theory Agency)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), Teori Agensi merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak antara hubungan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Dan di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak *principal* memberi wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Setyapurnama dan Norpratiwi (2004) menyatakan hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda atau yang sering disebut dengan konflik kepentingan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun demikian manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Selain itu, teori agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*information asymmetric*). Manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Adanya asimetri informasi antara

manajemen dengan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik guna memaksimalkan keuntungan pribadi (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan (Waryanto, 2010).

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

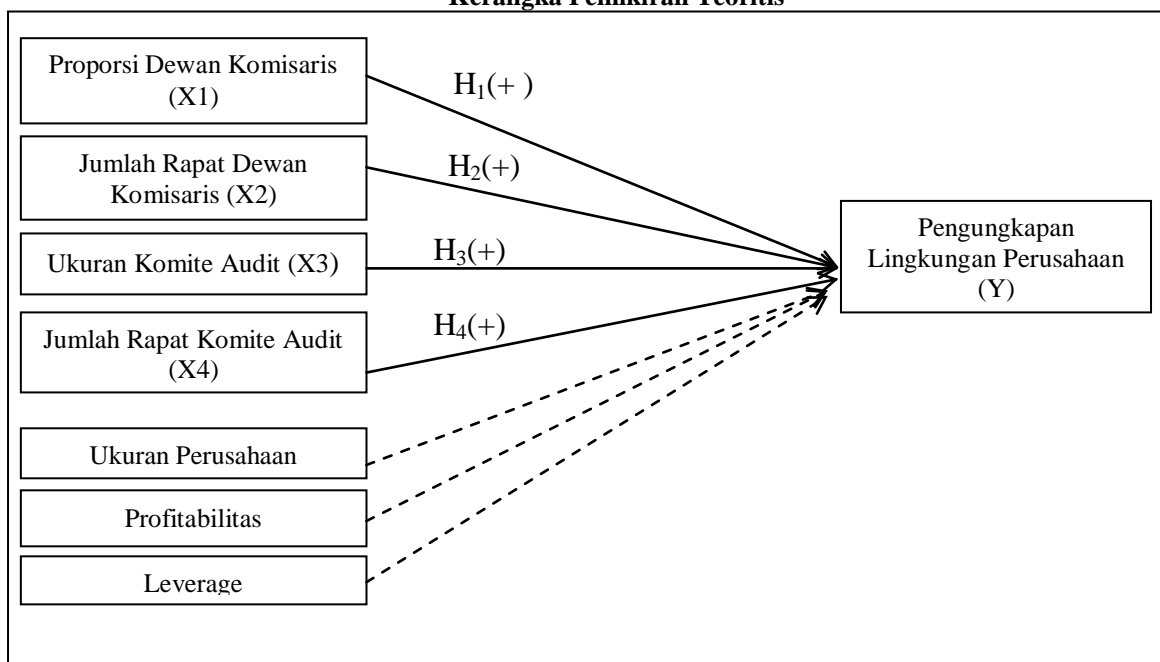
Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989).

Pengungkapan aktivitas CSR dianggap sebagai salah satu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan (Ghozali dan Chariri, 2007) yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh yang baik maupun dampak yang buruk.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini menggunakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Sun, dkk (2010). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit sebagai variabel independen. Pengungkapan lingkungan perusahaan sebagai variabel dependen serta dalam penelitian menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis berdasarkan model penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Pengembangan Hipotesis

Proporsi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2010). Sikap independensi dari pihak luar serta memiliki tujuan untuk kepentingan perusahaan menjadikan keberadaan dewan komisaris independen sangatlah penting bagi kelangsungan perusahaan. Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 III.1.4. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan diharapkan kinerja dewan komisaris mampu melakukan pengawasan semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan perusahaan dalam hal ini mendorong peningkatan pengungkapan lingkungan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan lingkungan perusahaan.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Di Indonesia, menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VII Pasal 108 dinyatakan bahwa Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Untuk mendukung terlaksananya tugas dewan komisaris secara maksimal, dewan komisaris perlu mengadakan pertemuan atau rapat yang disebut dengan rapat dewan komisaris. Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Hal ini berarti semakin sering frekuensi dewan komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka pengungkapan lingkungan perusahaan oleh perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

Ukuran Komite Audit Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Menurut FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Hal ini dikarenakan untuk menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik pengungkapan lingkungan perusahaan. Ukuran komite audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja dengan lebih baik. Penelitian oleh Handayani dkk (2008) menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan pengungkapan lingkungan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Ukuran Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

Jumlah Rapat Komite Audit Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah pertemuan formal dan informal. Pertemuan dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan

perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jumlah pertemuan komite audit dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang dibebankan kepada komite audit. Komite audit biasanya membuat agenda rapat dengan menerima masukan dari manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Dalam penelitian Waryanto, (2010) menemukan jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan maka semakin kecil potensi manajer untuk tidak melakukan pengungkapan lingkungan perusahaan untuk mengelabui *stakeholder*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian

Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Pengukuran variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI) pada indikator lingkungan yaitu dihitung dengan menjumlahkan item pengungkapan yang diungkapkan perusahaan dibagi dengan total item pengungkapan.

Proporsi Dewan Komisaris

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu proporsi dewan komisaris diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris di perusahaan tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

Dalam penelitian ini pengukuran rapat dewan komisaris konsisten dengan penelitian said, dkk(2009) yaitu diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris selama 1 tahun.

Ukuran Komite Audit

Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini konsisten dengan sun, dkk.(2010) diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan berdasarkan jumlah keseluruhan anggota komite audit.

Rapat Komite Audit

Serta jumlah rapat komite audit konsisten dengan penelitian sun, dkk (2010) yaitu jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit perusahaan dalam waktu satu tahun.

Variabel kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sun, dkk(2010) yaitu:

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset perusahaan.

Profitabilitas diukur dengan *return on assets* yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aset.

Sedangkan *leverage* diukur dengan *debt equity ratio*, yaitu total hutang dibagi total ekuitas.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 – 2011. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria menerbitkan *annual report* dan memiliki data lengkap mengenai variabel terkait.

Metode analisis data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$CEDit = \alpha_0 + \alpha_1INKOMit + \alpha_2RAKOMit + \alpha_3KOMAUDit + \alpha_4RADITit + \alpha_7 SIZEit + \alpha_6ROAit + \alpha_7LEVit + e$$

Dimana:

- CEDit = *Corporate environmental disclosure* (pengungkapan lingkungan perusahaan)
- α_0 = Konstanta
- α_1 - α_6 = Koefisien
- INKOMit = Proporsi Dewan Komisaris
- RAKOMit = Jumlah Rapat Dewan Komisaris
- KOMAUDit = Ukuran (jumlah) Komite Audit
- RADITit = Jumlah Rapat Komite Audit
- SIZEit = Ukuran Perusahaan diproksikan dengan Total Aset
- ROAit = Profitabilitas diproksi dengan Return On Assets
- LEVit = Rasio Leverage diproksi dengan Debt to Equity Ratio
- e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 yang menerbitkan laporan tahunan. Distribusi pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	2010	2011	Total
1	Jumlah perusahaan industri sektor pertambangan yang terdaftar di BEI	29	32	61
2	Annual report yang tidak dapat diakses	(1)	0	(1)
3	Tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian	(8)	(10)	(18)
4	Data outlier	(2)	(2)	(4)
	Total Observasi	18	20	38

Analisis deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas variabel-variabel penelitian. Alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi yang tersaji pada tabel 2.

Tabel 2

Statistik deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std Dev
Pengungkapan lingkungan perusahaan	0.033333	1.000000	0.270982	0.334635
Proporsi dewan komisaris	0.250000	0.500000	0.394173	0.077537
Rapat dewan komisaris	1.000000	35.00000	7.710526	7.184472
Ukuran komite audit	2.000000	7.000000	3.631579	1.282334
Rapat komite audit	2.000000	51.00000	14.21053	13.09871
Profitabilitas	0.045420	2.398758	0.193977	0.388563
Leverage	0.123126	55.16423	2.952480	8.903211
Ukuran perusahaan	440217.0	78879491	12199798	17372079

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel proporsi dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, rapat komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi dianggap tidak hanya menentukan

besarnya hubungan tetapi menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta menunjukkan arah dari pengaruh tersebut. Ringkasan hasil pengujian tersebut adalah seperti dalam tabel pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik T

Variabel	p-value
Proporsi dewan komisaris	0.2055
Rapat dewan komisaris	0.0016*
Ukuran komite audit	0.0013*
Rapat komite audit	0.6216
Ukuran perusahaan	0.6451
Profitabilitas	0.5647
Leverage	0.6985

Keterangan: *) Signifikan

Proporsi dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki hubungan positif namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori agensi, dimana semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan yang dilakukan kepada manajemen akan semakin efektif, sehingga manajemen akan melakukan pengungkapan secara luas termasuk dalam pengungkapan lingkungan perusahaan (sembiring, 2005). Hal ini terjadi karena dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai pengungkapan lingkungan perusahaan dikarenakan mereka tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan aktivitas atau operasi sehari-hari perusahaan. Serta keberadaan komisaris independen hanya itu mematuhi peraturan BEJ, Peraturan tersebut menyiratkan bahwa persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Dapat dilihat dalam hasil statistik deskriptif proporsi dewan komisaris sebesar 39,4%.

Rapat dewan komisaris pengungkapan lingkungan perusahaan

Dalam penelitian ini jumlah rapat dewan komisaris memiliki arah hubungan positif dan memiliki nilai signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering dewan komisaris melakukan rapat maka semakin baik pelaksanaan pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Kharis (2012) rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategis perusahaan. Rapat dewan komisaris yang dilakukan secara berkala dan berbobot maka akan memberikan nilai tambah terutama dalam meningkatkan ketaatan dalam Pengungkapan lingkungan perusahaan.

Ukuran komite audit pengungkapan lingkungan perusahaan

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki hubungan positif dan memiliki nilai signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Penelitian yang dilakukan oleh Handajani dkk (2008) menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan pengungkapan CSR. Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik dan Pengungkapan lingkungan perusahaan. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen perusahaan.

Rapat komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan

Dalam penelitian ini rapat komite audit memiliki hubungan positif namun memiliki nilai yang tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Widowati (2009) yang menyatakan bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan akan berjalan efektif. Rapat komite audit bukanlah menjadi ukuran keefektifan komite audit dalam menjalankan tugasnya. Sehingga frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Variabel kontrol terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan

Ukuran Perusahaan memiliki arah hubungan positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2006). Pengungkapan lingkungan perusahaan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Dimana perusahaan besar maupun kecil, belum tentu melakukan pengungkapan lingkungan perusahaan secara luas. Hal ini dikarenakan perusahaan belum menganggap efektifitas dari pengungkapan lingkungan perusahaan. Artinya pengungkapan lingkungan perusahaan belum dianggap sebagai kebijakan yang memiliki dampak positif bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

Dalam penelitian ini profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari sisi legitimasi menurut Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal didukung dengan argumentasi bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini leverage memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal ini berarti tidak berhasil mendukung teori agensi. Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
2. Proporsi dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
3. Variabel kontrol yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, maka implikasi teoritisnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dewan komisaris independen belum berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atas aktivitas perusahaan.
2. Rapat dewan komisaris berfungsi untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategis perusahaan.
3. Peran dan tanggung jawab komite audit pada perusahaan di Indonesia telah berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Rapat komite audit tidak dapat menjadi ukuran keefektifan komite audit dalam menjalankan tugasnya.
5. Perhatian perusahaan lebih mengarah pada laporan keuangan yang berkaitan dengan total aset, kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba serta kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban perusahaan pengungkapan lingkungan perusahaan kurang efektif.
6. *Mandatory disclosure* merupakan alternatif untuk mendorong perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan perusahaan. sehingga hal ini dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yakni:

1. Jumlah sampel yang relatif terbatas, yaitu 21 perusahaan pertambangan. Hal ini dikarenakan sedikitnya perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu periode pengamatan relatif pendek, yaitu pada tahun 2010-2011, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang diamati kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan pihak lain (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional) dalam menentukan luas pengungkapan sebagai bahan pemeriksaan kembali.
2. Diharapkan adanya peningkatan peran proporsi komisaris independen serta jumlah rapat komite audit sehingga dapat meningkatkan perusahaan dalam pengungkapan lingkungan perusahaan.
3. Diharapkan perhatian perusahaan tidak hanya pada laporan *financial* perusahaan namun juga pada pengungkapan lingkungan perusahaan.

REFERENSI

- Angraini, Fr. R. R. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan". *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang. 23-26 Agustus.
- Belkaoui, A. dan PG. Karpik. 1989. "Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 2, No. 1, hal. 36-51.
- Boediono, G. S. B. (2005). "Kualitas laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur". *The Simposium Nasional Akuntansi 8*. Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo.
- Chih, H., Shen, C. and Kang, F. (2008), "Corporate social responsibility, investor protection, and earnings management: some international evidence", *Journal of Business Ethics*, 79, pp. 179-198.
- Darmawati, D. (2006). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*". *Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9*, Universitas Andalas, Padang.
- Deegan, Craig. (2002). "The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures a Theoretical Foundation". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol. 15 No.3, pp.282-311.
- Deegan, Craig. 2004. "Environmental Disclosure and Share Price- A Discussion about Efforts to Study This Relationship". *Accounting Forum*. Vol.28 pp.122-136.
- Fatayaningrum, D. 2011. "Analisis Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Corporate Environmental Disclosure*". *Skripsi tidak dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Forum *Corporate Governance* Indonesia. 2002. "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)". Jakarta.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2006. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiatives (GRI). 2011. "Environment Indicator Protocols". <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Environment-Indicator-Protocols.pdf>. Diakses tanggal 16 September 2012.
- Gray, Rob, Reza Kouhy & Simon Lavers, 1995. "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 8 No.2 p. 47-77.
- Gujarati, Damodar. (2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Guthrie, J. and Parker, L. 1989. "*Corporate Social Reporting: A Rebuttal Of Legitimacy Theory*". *Accounting and Business Research*. Vol 19, No. 76, pp 343-352
- Handajani, Lilik., dkk. (2010) "The Effect of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism to Corporate Social Responsibility Disclosure: Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange". *Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XII*, Purwokerto.
- Hashim, Hafiza Aishah dan Devi, S. Susela. 2007. "*Corporate Governance, Ownership Structure And Earnings Quality: Malaysian Evidence*". Universiti Malaya.
- Hendriksen, Eldon S. 2000. *Teori Akuntansi (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- IDX Fact Book 2011.
- Jensen, M. C. and W. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3 305-360.
- Keputusan Ketua BAPEPAM (2004), nomor : Kep-29/PM/2004.
- Kharis, Abdul. 2012. "*Corporate Governance dan Ketaatan pada Badan Umum Milik Negara*". Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.16, Hal 37-44.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2010. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Muntoro, Ronny Kusuma. 2006. Makalah "Membangun Dewan Komisaris yang Efektif".
- OECD. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Publication Service.

- Prior, D., Surroca, J. and Tribo, J. (2008). "Earnings Management and Corporate Social Responsibility", *Working Paper No. 06-23, Business Economics Series 06*. Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, pp. 1-42.
- Puspitasari, Apriani Daning. 2009. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Laporan Tahunan Perusahaan Di Indonesia". *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro
- Said, Zainuddin dan Haron. 2009. "The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance Characteristics In Malaysian Public Listed Company". *Social Responsibility Journal*. Vol. 5 No. 2, pp. 212-226
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". *Simposium Nasional Akuntansi 8*. Solo, Hal 379-395.
- Setyapurnama, Yudi Santara dan Norpratiwi, A.M.V. 2005 "Pengaruh Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi". Program pasca sarjana UGM. Jogjakarta.
- Suhardjanto, Djoko. 2010. "Pengaruh *Corporate Governance*, Etnis, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap *Environmental Disclosure*". Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Volume 14, No.2: 151-164.
- Sun, N., Salama, A., Hussainey, K., and Habbash, M. 2010. "Corporate Environmental Disclosure, Corporate Governance, and Earnings management". *Managerial Auditing Journal*. Vol.25 No.27 pp 679-700.
- Ujiyantho, Muh. Arief., dan Bambang Agus Pramuka. 2007. "Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur)". *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Waryanto. 2010. "Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di Indonesia". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Widowati, Nungki. 2009. "Pengaruh *Corporate Governance* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Winarno, Wing Wahyu. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2007.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 2000. "WBSD's First Report-Corporate Social Responsibility". Geneva.
www.idx.co.id
www.theglobal-review.com, diakses 24 September 2012
- Xie, Biao, Wallace N Davidson III, And Peter J. Dadalt. 2003. *Earnings Management and Corporate Governance. The Role of The Board And The Audit Committee*. Journal Of Corporate Finance Volume 9 June: 295-316
- Zahra, S. A., Priem, R. L., & Rasheed, A. A. (2005). *The Antecedents and Consequences of Top Management Fraud*. Journal of Management, 31, 803-828.